

BAB II

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang membahas dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan koordinasi pemungutan. Disini peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Arief Susilo⁶ yang berjudul "*Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Pemungutan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*". Dan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sukma Nasution⁷ yang berjudul "*Analisis koordinasi Pemungutan BBN KB (BBN II) Di Provinsi DKI Jakarta Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah*".

Tesis yang dibuat oleh Arief Susilo mengangkat masalah yaitu sejauh mana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dilakukan dengan optimal oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan apakah penyebab administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dan bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemungutan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutan dan mengkaji implikasi administrasi pemungutan, serta mengetahui bagaimana implikasinya terhadap efektivitas

⁶ Arief Susilo, *Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Pemungutan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*(Jakarta, Fisip UI, 2002)

⁷ Nadia Sukma Nauli Nasution, *Analisis Koordinasi Pemungutan BBN KB Bekasi (BBN II) Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah*, (Depok, FISIP UI, 2007)

pemungutan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan, namun demikian tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang diukur dengan menggunakan ratio *Tax Performance Index* (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil.

Selain tesis tersebut, penulis juga melihat skripsi yang ditulis oleh Nadia Sukma Nasution. Skripsi tersebut mengangkat masalah koordinasi pemungutan BBN KB bekas (BBN II) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat DKI Jakarta mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan menguraikan dan menganalisis koordinasi timbal balik yang efektif antara instansi di Kantor Bersama Samsat DKI Jakarta dalam rangka pemungutan BBN KB bekas (BBN II).

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, dimana peneliti menggali kesatuan atau fenomena tunggal (kasus) yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas (program, kajian, proses, institusi, atau kelompok sosial), dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang lama. Fenomena sosial yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pelaksanaan koordinasi pada Kantor Bersama Samsat dalam pemungutan BBN KB Bekas (BBN II) di Provinsi DKI Jakarta, serta koordinasi pemungutan BBN KB Bekas (BBN II) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama

Samsat dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif.

Selain itu Nadia Sukma Nasution menyimpulkan dalam skripsinya bahwa dalam proses pemungutan BBN II yang berkaitan dengan perpanjangan PKB pada saat pengecekan fisik dan penelitian dokumen surat bukti kepemilikan kendaraan oleh pihak Kepolisian tidak sepenuhnya melibatkan instansi lain yang ada di kantor Samsat. Hal ini mengakibatkan koordinasi antar instansi yang kurang optimal. Kemudian koordinasi timbal balik yang efektif diterapkan di kantor dalam rangka optimalisasi BBN II adalah Dipenda sebagai instansi yang berkepentingan memungut BBN II juga ikut dilibatkan dipintu pertama dalam proses penelitian surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor bekas.

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Arief Susilo yang memusatkan penelitian pada Air Bawah Tanah dan Nadia Sukma Nasution yang memusatkan penelitian pada BBN KB bebas (BBN II). Sedangkan pada penelitian penulis akan dianalisis, dikaji dan dibahas implementasi koordinasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau dalam mendukung optimalisasi penerimaan asli daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah melibatkan beberapa instansi yaitu: Dinas Pendapatan Riau, Kantor Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru, dan Dinas Pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah mengenai bagaimana koordinasi yang baik antara beberapa instansi yang saling terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah, sehingga pemungutannya

optimal. Berikut ini dapat dilihat matriks perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya:

Tabel II.1
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Temuan
Arief Susilo	Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Pemungutan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Deskriptif analisis	Dinas Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan
Nadia Sukma Nasution	Analisis Koordinasi Pemungutan BBN KB (BBN II) di Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah	Kualitataif	Dalam proses pemungutan BBN KB II yang berkaitan dengan perpanjangan PKB pada saat pengecekan fisik dan penelitian dokumen surat bukti kepemilikan kendaraan oleh pihak kepolisian tidak sepenuhnya melibatkan instansi lain yang ada di kantor Samsat

Sumber: Diolah penulis

A.1. Pajak Daerah

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling aman dan handal saat ini. Penerimaan pajak juga mempunyai peranan sangat dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Pos penerimaan dalam negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. Realisasi penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan, sebab perannya yang strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerimaan pajak yang merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena besarnya pajak akan seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas penduduk. Hal ini berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan berkesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sumber dana ini perlu dikelola dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka perlu banyak memperhatikan unsur pembiayaan pembangunan. Salah satu unsur untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam rangka membiayai pembangunan yaitu mengalirnya sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak memiliki pengertian yang bermacam-macam, salah satu definisi yang terkenal ialah definisi pajak menurut Adriani sebagaimana dikutip oleh Waluyo dan Ilyas dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Kebijakan pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pungutan yang dilakukan

⁸ Waluyo dan Wirawan Ilyas, *Perpajak Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, 2003), hal. 4

oleh pemerintah daerah tersebut, digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Mardiasmo, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

*Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.*⁹

Secara umum, pajak mempunyai fungsi-fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

fungsi *budgetair* disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*),¹⁰ dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, fungsi *budgetair* memberikan pembenaran bahwa negara mempunyai hak memungut pajak untuk mengisi kas negara.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga tambahan,¹¹ dimana pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Mardiasmo mengklafikasikan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan yaitu:

a. *Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan gunakan untuk membiayai rumah tangga negara.*

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea materai.

b. *Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.*

*Contoh: Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.*¹²

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, (Yogyakarta, Andi Offset Multidimensi,2003), hal. 192

¹⁰ Safri Nurmantu, *Pengantara Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), Hal 30

¹¹ Ibid, Hal.36

¹² Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal 6

Pajak daerah memiliki beberapa definisi, dimulai dengan definisi pajak daerah menurut Josef Riwu Kaho, memberikan penjelasan Pajak Daerah sebagai berikut:

*Merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.*¹³

Selanjutnya, Davey mengemukakan bahwa perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

1. *Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri ;*
2. *Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah daerah;*
3. *Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;*
4. *Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.*¹⁴

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten atau kota yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

145 ¹³ Jusuf Riwu Kaho, *Prospek otonomi Daerah Di NKRI*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hal.

¹⁴ K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: UI-Perss, 1988), hal. 39

A.2. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan mempunyai peran yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil. De Leon sebagaimana dikutip oleh Rosdiana memberikan pengertian untuk administrasi perpajakan adalah seperangkat cara dan prosedur dari penghitung (*assessing*), pemungutan (*Collection*) atau penagihan (*enforcing*) pajak terutang. De Leon juga menambahkan dua fungsi yang terkait dengan administrasi perpajakan, yakni pelaksanaan (*assessment*) dan pemungutan (*collection*).

Administrasi perpajakan yang baik di negara-negara berkembang menurut Richard, Bird and Casanegra dinyatakan sebagai berikut:

*The best tax administration is not simply one that collects the most revenue. How that revenue is raised – that is, the effect of the revenue generation effort on equity, on the political fortunes of governments and on the level of economic welfare – may be equally important.*¹⁵

Di mana suatu administrasi perpajakan yang baik, tidak hanya mengumpulkan banyak penerimaan, tetapi juga ditunjang dengan hal yang lebih penting lagi, yaitu keadilan, politik, dan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Kemudian menurut Ikhsan dan Salomo, administrasi perpajakan yang diartikan dengan pengelolaan pajak yang mencakup upaya pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia dalam instansi perpajakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal.¹⁶ Administrasi perpajakan mengandung 3 komponen, yaitu :

¹⁵ Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher, *Improving Tax Administration in Developing Countries*, (Washington D.C: International Monetary Fund, 1997), hal 10

¹⁶ M.Ikhsan dan Roy V.Salomo, *Keuangan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: STIA-LAN, 2002), hal 107

1. Instansi atau badan yang memberikan wewenang dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi/badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijakan perpajakan.

Menurut Mansury, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan administrasi perpajakan. Salah satu dasar dari terselenggaranya administrasi perpajakan yang efisien dan informatif adalah informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, dasar lainnya yaitu kejelasan, kesederhanaan, dan kemudahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁷

Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik menurut Nowak sebagaimana dikemukakan Mansury adalah sebagai berikut:

1. *Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi perpajakan dan memberikan kejelasan bagi wajib pajak*
2. *Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan aparat perpajakan dan untuk dipatuhi pajaknya oleh wajib pajak.*
3. *Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan*

¹⁷ R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan, 2002), Hal 23

*efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.*¹⁸

Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.

A.3. Koordinasi

Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai macam definisi mengenai konsep koordinasi. Dalam sebuah organisasi, koordinasi merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Maka hal yang harus dilakukan dalam koordinasi pada organisasi itu yaitu harus disatukan, diintegrasikan dan diarahkan untuk tercapainya tujuan.

Dalam mencapai suatu tujuan tertentu, suatu organisasi melakukan koordinasi dengan organisasi lainnya, namun tidak jarang tujuan yang hendak dicapai dalam keterkaitan dengan koordinasi tidak dapat diwujudkan. Melaksanakan koordinasi tidaklah mudah, perlu penyesuaian serta penyerasian dari masing-masing tugas dan fungsi ke dalam suatu ikatan tugas dan fungsi. Kelemahan dalam penyesuaian ini sering kali menjadi penyebab kegagalan dalam organisasi, terutama dalam organisasi publik. Oleh karena itu, ada baiknya jika dipahami terlebih dahulu kerangka dasar dalam koordinasi.

Koontz dan O'Donnel memandang koordinasi sebagai fungsi yang krusial pada manajemen dan menempatkannya sebagai suatu bagian integral dari seluruh fungsi

¹⁸ Ibid, hal 6

manajemen yang ada.¹⁹ Dengan adanya fungsi dan keberadaan yang krusial maka sepatutnya suatu organisasi dalam melakukan kegiatannya tetap mengedepankan fungsi koordinasi sebagai perekat dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Mengenai kedudukan koordinasi yang dinilai penting dalam suatu organisasi ataupun manajemen, Hasibuan menyatakan bahwa:

koordinasi penting dalam suatu organisasi karena:

1. *Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.*
2. *Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.*
3. *Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.*
4. *Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.*²⁰

Sasaran suatu organisasi adalah agar dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan kegiatan mengarahkan unsur-unsur manajemen dimana di dalamnya terdapat unit-unit yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, koordinasi diperlukan apabila terdapat selain ketergantungan pekerjaan/aktivitas yang tinggi dalam organisasi. Kemudian koordinasi diperlukan apabila keberhasilan suatu kelompok dalam menjalankan tugas tergantung kepada cara unit atau kelompok lain dalam menjalankan tugasnya yang terkait.

Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi, hal ini disebabkan karena dalam organisasi pasti terdapat departementasi. Departementasi tujuannya untuk melaksanakan tugas. Adanya pembagian organisasi dalam satuan organisasi terjadilah pembagian kerja. Dalam pembagian kerja ini dapat terkait pimpinan-

¹⁹ R.D Agarwal, *Organization and Managemen*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 1982), hal 7

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta:Gunung Agung, 1996), hal. 87

pimpinan yang harus mendudukinya. Masing-masing satuan organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri dan seringkali karena terlalu memperhatikan tugasnya sendiri cenderung lupa tujuan organisasi secara keseluruhan.²¹

Tentang koordinasi, Pfiffner dan Presthus mengatakan bahwa tugas pokok atau "*central task*" dari seorang eksekutif di dalam suatu organisasi yang besar adalah koordinasi. Pemegang "*central task*" ini di dalam pemerintahan adalah pejabat-pejabat yang membuat kebijaksanaan, yang mereka namakan "*policy making civil servants*" termasuk di dalamnya: kepala pemerintahan, menteri-menteri, kepala-kepala dinas, kepala-kepala jawatan, kepala seksi, kepala sekretariat, kepala biro, dan sebagainya.²²

Sugandha dalam bukunya Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, merumuskan bahwa:

*Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisien.*²³

Dengan demikian, dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya koordinasi dapat diartikan sebagai usaha penyatupaduan gerak dari seluruh potensi organisasi, badan atau instansi yang berbeda fungsi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi guna mencapai suatu sasaran/tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pada dasarnya terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada kegiatan koordinasi, diantaranya

²¹ A.W. Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen* (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), hal. 27

²² Dann Sugandha, *Koordinasi* (Jakarta, Intermedia, 1988), hal 21

²³ Daan Sugandha, *ibid*, hal 12

sebagaimana dinyatakan Handyaningrat dalam bukunya *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, yang menyebutkan bahwa ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. *Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.*
- b. *Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama dan kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.*
- c. *Koordinasi adalah proses yang terus-menerus.*
- d. *Koordinasi adalah adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.*
- e. *Koordinasi merupakan salah satu konsep kesatuan tindakan. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.*²⁴

Koordinasi menurut, Malone dan Crowston mengemukakan bahwa tanpa adanya ketergantungan, maka tidak ada yang perlu dikoordinasikan. Penekanannya terletak pada saling ketergantungan (*interdependence*), hal ini yang menjadi dasar definisi koordinasi.

A.3.1. Bentuk Koordinasi

Dalam menjalankan tugas, fungsi koordinasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Ada berbagai bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara lain :²⁵

1. Koordinasi Berangkai

Saling ketergantungan berangkai terjadi apabila seseorang, kelompok atau divisi tidak dapat menjalankan tugas atau pekerjaan sebelum orang, kelompok atau divisi lain telah melaksanakan tugas lainnya yang terkait.

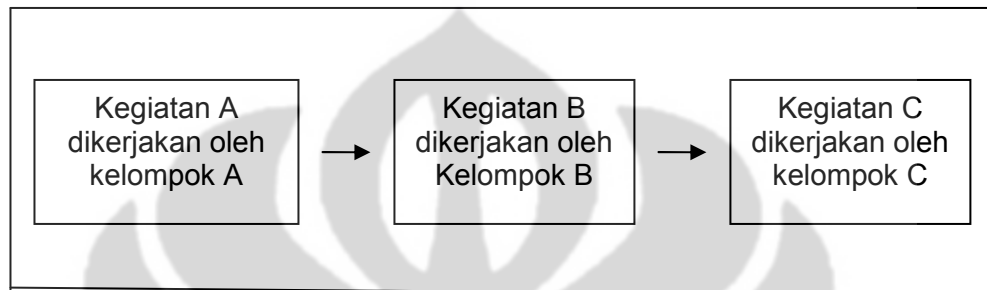
Pada tingkat kelompok, proses ketergantungan tersebut terlihat pada

²⁴Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta; CV Haji Masagung, 1991), hal 195

²⁵ C.W.L Hill and G.R Jhon, *Strategic Management Theory: An Integrated Approach*, 3rd edition, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1995), hal 115

rangkaian. Untuk memberi gambaran tentang ketergantungan berangkai dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.1
Tipe Koordinasi Ketergantungan Berangkai

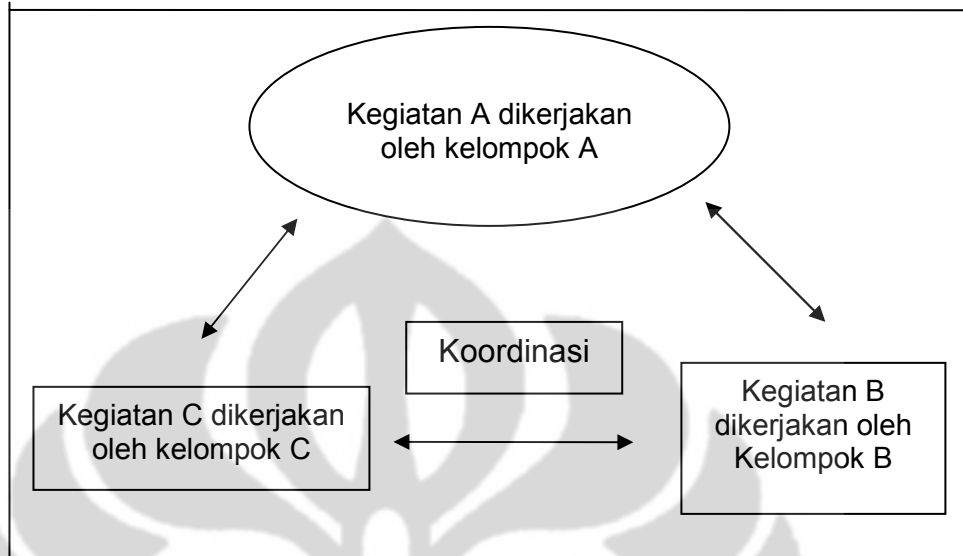


Sumber: Jhon,G.R., dan C.W. Hill, *Strategic Managemen Theory: An Integrated Approach*, (edition 3rd), (Boston: Houghton Mifflin Company, 1995), hal 127

2. Koordinasi Timbal Balik

Ketergantungan timbal balik terjadi apabila dua orang atau lebih orang, kelompok atau devisi harus berinteraksi pada saat bersamaan untuk penyelesaian sebuah tugas atau kegiatan, dalam tipikal ketergantungan seperti ini, organisasi hanya dapat mencapai keberhasilannya apabila seluruh orang, kelompok atau divisi saling berkoordinasi dan saling berkontribusi positif terhadap tugas atau kegiatan yang terkait. Salah seorang atau kelompok saja yang gagal dalam berinteraksi, secara langsung akan berdampak pada kegagalan dalam upaya mencapai tujuannya. Gambar ketergantungan timbal balik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II.2
Tipe Koordinasi pada Ketergantungan Timbal Balik

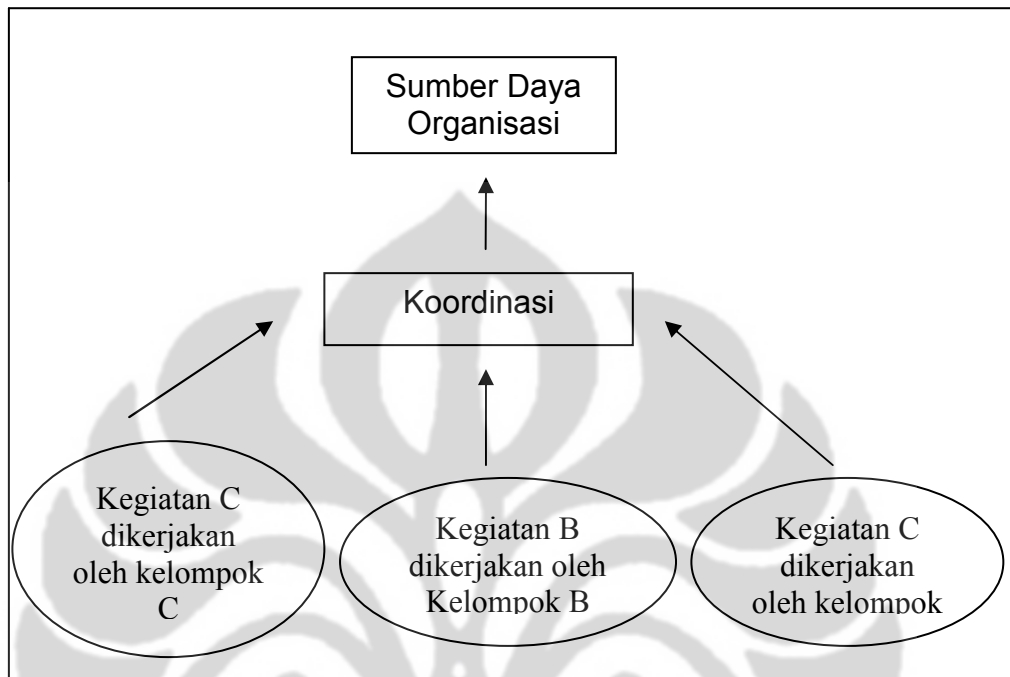


Sumber: Jhon,G.R., dan C.W. Hill, Strategic Managemen Theory: An Integrated Approach, (edition 3rd), (Boston: Houghton Mifflin Company, 1995), hal 129

3. Koordinasi dalam memanfaatkan sumber daya bersama

Koordinasi pada tipikal ketergantungan ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang membutuhkan akses pada fasilitas secara bersama-sama antara kelompok atau individu yang satu dengan kelompok atau individu yang lainnya dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Misalnya dalam hal ini adalah koordinasi dalam memanfaatkan atau menggunakan fasilitas gedung maupun peralatan kantor. Koordinasi semacam ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dan permasalahan yang akan ditimbulkan. Dapat dilihat gambar koordinasi pada ketergantungan ini, disajikan berikut ini:

Gambar II.3
Tipe Koordinasi pada Ketergantungan dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Bersama



Sumber: Jhon,G.R., dan C.W. Hill, *Strategic Managemen Theory: An Integrated Approach*, (edition 3rd), (Boston: Houghton Mifflin Company, 1995), hal 129

Setelah menentukan bentuk koordinasi yang akan dijalankan, tentunya untuk kedepannya diharapkan koordinasi dapat berjalan secara baik dan efektif.

A.3.II.Tipe-tipe Koordinasi

Didalam koordinasi terdapat beberapa tipe-tipe menurut jenisnya. Yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegaitan unit-unit, ketentuan-ketentuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi Horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat.

Koordinasi horizontal terdiri atas 2, yaitu:

- a. *Interdisciplinary*, adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- b. *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (Instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan, baik secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur, sebab kedudukannya setingkat.²⁶

A.3.III.Cara Mewujudkan Koordinasi

Dalam melakukan wujud koordinasi di dalam organisasi, koordinasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Adapun cara yang dipilih dalam mewujudkan koordinasi tersebut secara rinci disajikan sebagai berikut.²⁷

²⁶ Malayu S.P. Hasibuan, op cit, Hal 89

²⁷ Stoner, James A.F. and Charles Wankel, *Manajemen*, (New Jersey: Printice-Hall, 1991), hal 108

1. Koordinasi melalui Manajemen Lini

Apabila individu atau kelompok yang dikoordinasi menyampaikan laporan pada atasan yang sama, maka pilihan cara mewujudkan koordinasi yang paling sederhana dalam tipe ini adalah menjadikan individu atau kelompok tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab atasan tersebut.

2. Koordinasi melalui Staf Khusus

Dalam banyak kejadian pada berbagai organisasi, terkadang berbagai aktivitas atau tugas yang perlu dikoordinasikan melampaui berbagai batasan struktur organisasi. Pada kasus seperti ini, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan posisi maupun bidang atau departemen baru. Penciptaan bidang atau departemen baru ini pada organisasi modern digantikan perannya oleh suatu tim, misalnya tim kendali manajemen, *assessment team*, dan istilah lainnya. Sedangkan untuk posisi perorangan atau individual, untuk jenis tanggung jawab yang sama digunakan istilah yang berbeda-beda, yakni ekspeditor, kurir, atau petugas penghubung (*liason officer*).

3. Koordinasi melalui Pengelompokan Tugas

Bentuk alternatif lain dalam mewujudkan organisasi adalah dengan mengelompokkan semua aktivitas yang perlu dikoordinasikan dalam suatu kelompok tugas atau divisi. Kebanyakan organisasi besar dalam mewujudkan organisasinya mengalami tingkat kesulitan yang tinggi dibandingkan dengan organisasi kecil. Hal ini berkenaan dengan sulitnya pengelolaan organisasi dalam memilih-milih aktivitas ke dalam kelompok-kelompok. Misalnya dalam suatu unit organisasi, apakah pengelompokan tugas atau aktivitas yang terdapat

di dalamnya seperti yang tercermin pada struktur organisasinya telah mampu menghasilkan kualitas kinerja organisasi yang berhasil? Jika dilihat perkembangan dan tuntutan pekerjaan serta berbagai tantangan di era global saat ini sulit untuk diakomodasi oleh struktur organisasinya, maka pada organisasi yang tercermin dalam struktur unit organisasi tersebut perlu dikaji ulang.

4. Koordinasi melalui Kelompok Proyek

Pada pengelompokan tugas yang ditujukan untuk koordinasi seperti yang diuraikan seperti pada bagian sebelumnya, biasanya bersifat permanen dan tetap sampai kebijakan organisasi yang baru ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidental atau dibatasi (biasanya) oleh waktu, koordinasi dengan kelompok proyek.

5. Koordinasi Spontan atau Informal

Banyak organisasi secara giat mendorong anggota organisasi untuk mengembangkan hubungan informal dan mengkoordinasikan kegiatan mereka tanpa terpaku pada hirarki kewenangan atau jabatan struktural yang formal. Tujuan dari koordinasi semacam ini adalah untuk menembus kebutuhan permasalahan yang biasanya disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang membolehkan adanya hubungan dengan individual atau kelompok lain, tetapi dalam suatu kasus tertentu menuntut adanya hubungan dengan individu atau kelompok lain hanya memiliki *mental block*, yaitu mementingkan dirinya atau kelompok sendiri dan sulit bekerja sama dengan individu atau kelompok lain. Dengan adanya koordinasi informal dan spontan ini, memungkinkan pekerjaan

dapat dijalankan dengan baik dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikannya relatif lebih singkat.

6. Koordinasi melalui Matriks

Pada dasarnya koordinasi ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya keragaman pada saat yang bersama. Pada parakteknya, koordinasi matriks ini dilakukan pada organisasi yang memiliki berbagai peran yang berbeda-beda dan memiliki perhatian yang sama terhadap satu tujuan yang sama yang sulit ditetapkan kebutuhan pegawainya dalam mengerjakan berbagai aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan juga. Melalui koordinasi matriks ini memubgkinkan seluruh anggota organisasi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam organisasi dapat diminta dan sekaligus bertanggung jawab pada seluruh atasan atau pimpinan di dalam organisasi tersebut. Koordinasi semacam ini relatif lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya manusia organisasi.

Agar organisasi dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, maka perlu diperhatikan berbagai perbedaan-perbedaan antara bagian organisasi (baik individu maupun kelompok) yang dapat mempersulit tercapainya koordinasi yang efektif. Perbedaan-perbedaan yang biasanya menimbulkan masalah koordinasi dalam organisasi diantaranya adalah :

- a. Perbedaan atas orientasi terhadap tujuan masing-masing kelompok atau individu. Koordinasi akan menjadi tidak efektif apabila masing-masing individu atau kelompok memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain.
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu. Menyadari bahwa seseorang individu atau kelompok lain saling memiliki ketergantungan, sehingga diharapkan antar

individu atau kelompok tersebut memiliki kesamaan orientasi terhadap waktu yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu kepada kegiatan yang selanjutnya dapat diteruskan oleh individu atau kelompok lain. Semakin berbeda dalam orientasi waktu antar individu atau kelompok ini akan menjadikan koordinasi tidak efektif.

- c. Perbedaan orientasi upaya antar individu atau kelompok. Dalam upayanya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, maka individu-individu atau kelompok-kelompok di dalamnya dituntut untuk memiliki orientasi yang sama terhadap upaya tersebut. Apabila seseorang individu atau kelompok berorientasi untuk mencapai upaya tersebut melalui orientasi yang berbeda dengan individu atau kelompok lain dalam upaya yang sama, maka akan menjadikan koordinasi menjadi efektif.
- d. Perbedaan dalam memformulasikan struktur. Misalnya, apabila individu atau kelompok yang bertugas untuk pemasangan instalasi dalam mengevaluasi kemajuan dengan ukuran keberhasilan yang dicapai berdasarkan tingkat kesalahan dalam menjalankan kegiatannya. Perbedaan ini mengakibatkan koordinasi antar individu atau kelompok tersebut menjadi tidak efektif.

A.3.IV.Pendekatan Terhadap Pencapaian Koordinasi Yang Efektif

Komunikasi adalah kunci yang efektif dalam koordinasi. Dalam komunikasi maka koordinasi dapat membuka jalan kearah saling pengertian, dan komunikasi dapat dianggap juga sebagai mekanisme yang ampuh untuk menciptakan koordinasi. Dengan demikian setiap koordinator harus bisa menjamin agar setiap pihak yang dikoordinasikannya tetap memperoleh pengetahuan mengenai apa yang sedang

dilakukan masing-masing unit atau organisasi. Oleh karena itu perlu adanya dorongan dan cara untuk saling menyampaikan informasi dan perlu diciptakan sistem informasi.

Ada 3 pendekatan terhadap pencapaian koordinasi yang efektif: ²⁸

1. Menggunakan Teknik Dasar Manajemen

Tuntutan koordinasi yang relatif sederhana sering tercapai melalui mekanisme manajemen dasar. Mekanisme tersebut adalah rantai komando organisasi yang menspesifikasi hubungan antara para anggotanya serta unit-unit, karenanya memudahkan arus informasi dan kerja diantara unit-unit. Alat bermanfaat lainnya ialah rangkaian peraturan dan prosedur yang dirancang untuk memungkinkan para karyawan menangani tugas-tugas koordinasi rutin secara cepat dan leluasa. Selain itu, koordinasi dari rencana-rencana strategis dan operasional dapat dicapai dengan menjamin bahwa semua unit mengarahkan upaya mereka pada tujuan yang sama yang lebih luas.

2. Meningkatkan Potensi Koordinasi

Apabila berbagai unit organisasi menjadi lebih saling bergantung atau ukurannya atau fungsinya menjadi lebih luas, diperlukan informasi yang lebih besar bagi organisasi untuk mencapai sasarannya dan potensi koordinasi harus ditingkatkan. Jika teknik-teknik dasar manajemen tidak cukup, mekanisme tambahan mungkin diperlukan sekali. Potensi koordinasi dapat

²⁸ James A.F. Stoner and R. Edward Freeman, *Manajemen Edisi Kelima*, (Jakarta, Intermedia, 1994), hal. 503

di tingkatkan dengan dua cara, secara vertikal dan secara horizontal (secara lateral).

a. Sistem Informasi Vertikal

Mengirim data ke atas dan kebawah jenjang organisasi. Komunikasi itu bisa terjadi di dalam atau diluar saluran komando. Sistem informasi Manajemen (SIM) telah dikembangkan untuk tiap bagian seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi internasional dan juga *data-base* yang mengumpulkan informasi dari banyak bagian, untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.

b. Mengabaikan Rantai Komando, memungkinkan adanya pertukaran informasi, dan keputusan-keputusan diambil pada jenjang dimana informasi yang dibutuhkan benar-benar ada. Ada beberapa jenis hubungan lateral yang relatif sederhana kemudian dilanjutkan dengan yang lebih kompleks yang memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar. Ada beberapa hubungan lateral, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Kontak Langsung

Kontak langsung merupakan hubungan lateral yang paling sederhana di antara para individu yang menghadapi situasi atau masalah yang sama. Hal ini menghindari perlunya perujukan masalah ke atas, kepada manajer devisi untuk menyelesaikannya.

- Peran batas-jangkauan

Peran batasan-jangkauan juga memudahkan hubungan lateral. Apabila banyaknya hubungan di antara bagian-bagaian meningkatkan secara dramatis, mungkin paling baik adalah menciptakan peran-peran batas jangkauan yang eksplisit dan menunjuk anggota-anggota unit untuk memegang peran tersebut.

- Panitia dan Satuan Tugas

Panitia merupakan kelompok yang biasanya diorganisasikan secara formal dengan penunjukan ketua serta anggota dan suatu jadwal pertemuan secara teratur. Sebaliknya satuan tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dengan maksud untuk menangani masalah-masalah yang khusus. Apabila tugas sudah diselesaikan maka satuan tugas itu dibubarkan.

- Peranan Pemandu

Peranan Pemandu adalah peran yang dibentuk apabila sebuah produk, jasa, atau proyek yang menjangkau beberapa bagian memerlukan koordinasi dan perhatian yang terus-menerus dari seorang individu saja yang bukan berada pada bagaian-bagaian yang bersangkutan

- Peran Penghubung Manajerial

Peran penghubung manajerial perlu diadakan kalau peran pemanduan tidak berhasil mengkoordinasi suatu tugas tertentu

secara efektif. Manajer penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek.

- **Organisasi Matriks**

Organisasi matriks memiliki karakteristik peran penghubung manajerial dan satuan tugas. Pada sebuah struktur matriks, manajer-manajer dari dua bidang menyelia sekelompok karyawan yang bertanggungjawab kepada kedua manajer tersebut, dengan jalan itu kebutuhan kedua bidang tersebut diperhitungkan secara rutin.

3. Mengurangi Kebutuhan Akan Koordinasi

Apabila kebutuhan akan koordinasi itu demikian besar sehingga metode sebelumnya tidak efektif, pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang ketat. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu:

- **Penciptaan Sumber Daya tambahan**

Penciptaan sumber daya tambahan disediakan sumber daya tambahan memberikan peluang/waktu ekstra kepada unit-unit dalam memenuhi kebutuhan masing-masing unit yang lain.

- **Penciptaan Unit-unit yang mandiri**

Menciptakan unit-unit yang dapat menjalankan sendiri secara intern semua aspek-aspek tugas yang diperlukan.

A.3.V. Revaluasi Koordinasi

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka koordinasi sangat diperlukan karena mungkin ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana tujuan harus dicapai, atau bahkan mungkin adanya perbedaan mengenai tujuan itu sendiri. Selain itu perlu dipastikan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dialokasikan secara tepat antar deperemen atau instansi. Sehubungan dengan hal itu maka perlu diyakini bahwa kegiatan suatu bagian dari pemerintah sejalan dengan kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian yang lainnya.

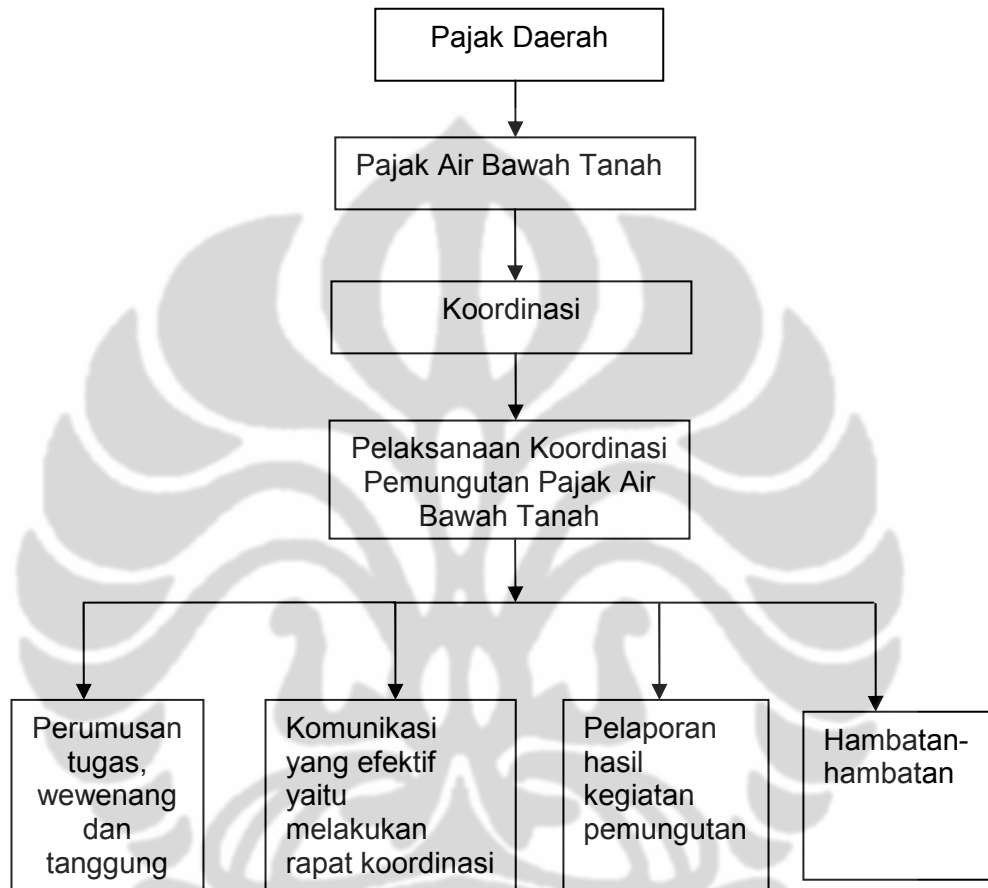
Dengan demikian perlu diadakan koordinasi ternyata disebabkan oleh beberapa macam faktor sebagaimana dinyatakan oleh Pfifner dan Presthus yang dikutip oleh Jones. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan tuntutan perlunya koordinasi adalah untuk:

- a. *Efisiensi dalam penggunaan sumber yang terbatas Memperkecil kemungkinan terjadinya konflik.*
- b. *Memperoleh keseragaman dalam kebijaksanaan pemerintah.*
- c. *Memperoleh kaitan/hubungan kerja yang efektif sehingga satu instansi dapat menunjang instansi yang lain.*
- d. *Menghilangkan overlapping atau duplikasi.*²⁹

²⁹ Jones, Gareth R., *Organizational Theory 3rd Edition, Theory Text and Casess* (New Jersey: Prentice-Hali Inc., 2001), hal.202

B. Konstruksi Model Teoritis

Gambar II.4
Konstruksi Model Teoritis



Sumber: diolah penulis

C. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan jembatan deduksi terpenting dalam yang menghubungkan antara rangkaian penjelasan teoritis dengan instrumennya. Dengan demikian terlihat bahwa konsep yang digunakan adalah konsep koordinasi, dimana

Variabel Koordinasi yaitu pelaksanaan koordinasi dari variabel tersebut dijabarkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Perumusan tugas dan tanggung jawab yang jelas
2. Komunikasi yang efektif yaitu melakukan rapat koordinasi
3. Pelaporan hasil kegiatan pemungutan
4. Hambatan-hambatan yang ada

Dari penjabaran di atas, maka diperoleh tabel operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Tabel II.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Koordinasi	Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ● Perumusan tugas dan tanggung jawab yang jelas ● Komunikasi yang efektif yaitu melakukan rapat koordinasi ● Pelaporan hasil kegiatan pemungutan ● Hambatan-hambatan yang ada

Sumber: Literatur, Bahan yang diolah penulis

D. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan penelitian diperlukan proses atau cara yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian berpengaruh terhadap

penentuan alat ukur yang digunakan dalam penelitian, langkah-langkah penelitian, sistematika pelaporan, dan penekanan pada objek penelitian.

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan karena berusaha untuk menjelaskan mengenai suatu gejala atau permasalahan serta berusaha untuk menemukan hukum-hukum atau pola-pola umum/universal. Tujuan utama dari pendekatan jenis ini adalah menghasilkan suatu generalisasi yaitu sebuah pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu populasi tertentu.³⁰

Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti.

II. Jenis Penelitian

Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.³¹ Berdasarkan tujuannya, penelitian yang peneliti lakukan dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai suatu gejala atau fenomena³². Ciri-ciri pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut:

³⁰ Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta, Andi, 1995), hal, 11.

³¹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian* (Jakarta: PPM,2003), hal.105

³² Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2005) hal.43

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang memadai.³³

Sesuai dengan judul penelitian yakni Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan koordinasi pemungutannya, serta menggambarkan kendala dalam melaksanakan koordinasi tersebut. Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai topik yang telah diketahui. Topik yang diangkat peneliti yaitu mengenai Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan memiliki gambaran yang lebih jelas akan kelayakan pemungutan Pajak Daerah tersebut.

II.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁴ Penelitian Ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan mengenai Implementasi dan koordinasi pelaksanaan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di wilayah Kota Pekanbaru-Riau.

³³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Edisi Ke-8* (Bandung: Tersito, 1998), hal.140

³⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan IV (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1999), hal 63

Menurut Whitney yang dikutip oleh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁵

II.2. Manfaat Penelitian

Dengan pemahaman akan jenis penelitian berdasarkan manfaatnya, penelitian ini dilakukan secara murni, penelitian ini dilakukan untuk kebutuhan intelektual bagi peneliti dengan menjelaskan pengetahuan yang mendasar mengenai dunia sosial dan apa yang menyebabkan sebuah peristiwa. Penelitian ini lebih memfokuskan hasil penelitian untuk kebutuhan intelektual dan bukan kepada usaha untuk menyelesaikan masalah.

II.3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dilihat dari penggunaan waktu, Penelitian ini menggunakan jenis *Cross Sectional Survey* karena penelitian ini dilakukan pada waktu tertentu atau pada suatu saat tertentu. Penelitian ini melihat gejala sosial yang terjadi, yaitu melihat Pelaksanaan Implementasi Koordinasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada masyarakat pengguna Air Bawah Tanah. Untuk dapat mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan survei. Metode Survey yang digunakan pada penelitian ini adalah *face to face interview*. Dengan Penelitian survey dengan metode tatap muka, tingkat pengambilan pengumpulan data pada satu saat bukan hanya satu hari

³⁵Ibid , hal54

saja, namun dapat dilakukan dalam beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Juni 2008. lokasi penelitian yang diteliti adalah Kota Pekanbaru – Riau. Newman mengemukakan bahwa penelitian *Cross Sectional Survey* merupakan penelitian yang mudah dan berbiaya murah serta tidak meliputi perubahan sosial secara luas.

*Cross Sectional research is usually the simplest and least costly alternative. Its disadvantage is that it cannot capture social processes or change.*³⁶

III Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan secara kuantitatif serta kualitatif. Pengumpulan data secara kuantitatif adalah dengan metode survey dan *observasi*. Penelitian survey dapat didefinisikan sebagai mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada. Didalam penelitian ini kita tidak perlu memperhitungkan hubungan variabel-variabel. Tujuan pokok adalah menggunakan data yang diperoleh untuk memecahkan masalah, dari pada untuk menguji hipotesis.³⁷ Dalam penelitian survey, seorang peneliti mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun dalam kuisisioner maupun dalam wawancara lisan yang hasilnya direkam.

Kemudian metode observasi didefinisikan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.³⁸ Dengan penelitian observasi, peneliti menyaksikan

³⁶ Bambang Kountur, *Op.Cit.*, hal 106

³⁷ Consuelo G. Sevilla, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P.Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantara Metode Penelitian*, (Jakarta, UI-Press, 1993), hal 76

³⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Grasindo,2002), hal 116

terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

Dalam menyusun skripsi ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode ini penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Gubernur dan Buku-buku lain yang terkait.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung obyek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak yang terkait.

c. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Dengan wawancara penulis dapat memberi informasi melalui wawancara dan data yang dicari oleh peneliti. Kriteria yang wajib dimiliki seorang informan adalah memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan terbilang langsung. Teknik wawancara mendalam lebih bersifat tidak berstruktur karena respon dari informan sangat diperhatikan untuk bisa memperoleh data yang lebih jelas.

IV. Narasumber/Informan

Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Riau serta Kantor Pendapatan daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Koordinasi pemungutan dan

pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan suatu kriteria dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, seperti yang ditetapkan oleh Neuman mengenai 4 (empat) kriteria informan yang baik, yaitu:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
- b. *The individual is currently involved in the field;*
- c. *The person can spend time with the researcher;*
- d. *Non analytic individuals make better informant.*³⁹

Dengan memenuhi kriteria tersebut, maka penentuan informan ini didasarkan pada kompetensi informan terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Informasi yang didapat dari informan bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan karena informan menguasai betul bidangnya yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai pihak yang merumuskan suatu kebijakan terutama berkaitan dengan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah. Dalam hal ini Dipenda sangat penting bagi peneliti sehingga dapat disebut sebagai informan utama.
2. Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru sebagai pihak yang memungut Pajak Daerah, terutama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan pajak Air Bawah Tanah di Kota pekanbaru. Untuk itu pendapat dari kantor pendapatan daerah provinsi riau Kota Pekanbaru sangat penting karena peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemungutan pajak air bawah tanah.

³⁹ W. Lawrence Neuman, W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (New York: Pearson Educatiaon, 2003), hal.145

3. Dinas Pertambangan sebagai pihak pengawasan dan pengendalian air bawah tanah, untuk itu pendapat dari Dinas Pertambangan sangat penting karena peneliti dapat mengetahui sejauh mana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dalam pengelolaan air bawah tanah
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai pihak perizinan air bawah tanah. Untuk itu pendapat dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sangat penting karena peneliti dapat mengetahui bagaimana perizinan air bawah tanah di daerah Kota Pekanbaru
5. Wajib Pajak Air Bawah Tanah sebagai pihak yang menggunakan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah, merupakan informan pendukung.

V. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data yang diperoleh. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari jawaban responden melalui wawancara mendalam yang diberikan. Data yang telah terkumpul pada penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada yaitu berupa studi literatur, dokumen dan arsip-arsip.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini menekankan pada makna dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan lebih banyak menggunakan kata-kata. Dan apabila terdapat data angka hanya dipergunakan

sebagai data pendukung untuk melengkapi analisis kualitatif. Dengan penggunaan kedua jenis data diharapkan saling melengkapi pada penelitian ini, unit analisisnya adalah instansi maupun pihak-pihak yang terkait yang terlibat dalam kebijakan mengenai koordinasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah, diantaranya Dispenda Propinsi Riau, Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Riau Pekanbaru, Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Pertambangan.

VI. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, masalah yang dihadapi peneliti selama proses penelitian yaitu adanya data yang diberikan kepada peneliti tidak jelas seperti angka-angka yang tercantum tidak ada sehingga data tersebut banyak yang tidak terpakai dalam penelitian ini. Selain itu, informan yang masih baru menjabat di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, sehingga informan tersebut kurang memahami permasalahan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Air Bawah Tanah ini. Dari masalah tersebut, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara kepada petugas-petugas yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, untuk menambah informasi pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dibutuhkan oleh peneliti.